



SEMINAR NASIONAL

Kantor AIPI, 9 September 2026

Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi Perwakilan

Moch. Nurhasim,
Peneliti Utama-PRP BRIN

Arah Diskusi

- Apakah calon wakil rakyat dan calon kepala pemerintahan telah **dipersiapkan** secara memadai sehingga tidak hanya **mempermudah Pemilih** dalam menentukan pilihan tetapi juga menjamin calon terpilih **mampu menampilkan kepemimpinan yang berintegritas**.
- Bagaimana Partai Politik **menyiapkan para calon wakil rakyat dan calon kepala pemerintahan?**
- Apakah Partai **mengusulkan calon** yang telah dipersiapkan organisasi lain, atau mencalonkan mereka yang memiliki modal yang kuat, ataukah, hasil kaderisasi sistimatis dan berkelanjutan
- **Pendidikan politik** macam apakah yang dilaksanakan oleh Partai Politik selama ini kepada Warga Negara?
- Apakah para Pemilih telah diperkaya dan dipermudah baik dalam mempertimbangkan berbagai isu publik maupun dalam menentukan **pilihan secara cerdas (political efficacy)?**

Orientasi Elektoral

Ekosistem sosio-kultural, ekonomi dan politik: **sebuah paradoks** yang memengaruhi partai politik dalam rekrutmen politik

Demokrasi Perwakilan yang Ideal

Dimensi	Makna dalam demokrasi perwakilan	Referensi utama
Ideologis	Partai memiliki orientasi nilai dan posisi politik yang jelas, konsisten, dan dapat membedakan dirinya dari partai lain	Sartori (1976); Downs (1957); Kitschelt (1994); Luna, Rosenblatt & Toro (2014)
Programatik	Partai menghubungkan preferensi masyarakat dengan kebijakan melalui program yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan	Pitkin (1967); Kitschelt (1994); Luna et al. (2014)
Kompetitif	Pemilih memiliki alternatif nyata di antara partai yang berbeda dan dapat mengganti pemerintah melalui pemilu	Dahl (1971); Downs (1957); Sartori (1976); Powell (2000)
Representatif	Wakil tidak sekadar memperoleh suara, tetapi bertindak untuk dan responsif terhadap kepentingan warga	Pitkin (1967); Powell (2000)

RANTAI REPRESENTASI YANG IDEAL



"Ketiga dimensi saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa ideologi, politik kehilangan arah. Tanpa program, politik kehilangan substansi. Tanpa kompetisi, politik kehilangan makna demokrasi."



REFERENSI UTAMA

• Pitkin (1967) • Dahl (1971) • Downs (1976)
• Sartori (1976) • Powell (2000)
• Kitschelt (1994, 2007) • Luna, Rosenblatt & Toro (2014)

Konteks Indonesia

Kondisi Sosio-kultural, ekonomi & politik masyarakat:

- **Politik identitas** (polarisasi sosial, agama & kompetisi politik)--Mitzner, 2019
- **Transaksi elektoral** (kajian-kajian P2P/PRP LIPI tentang Pemilu sejak 2004-2024)
- **Biaya politik tinggi** [*democracy for sale*: Aspinal, 2019].
- **Partai politik kartel** [Ambardi, 2009].
- Menguatnya **dinasti politik** dan **orang kuat lokal** di era reformasi [Demokrasi Cukong: Hidayat, 2024]
- **Pemilih** rasional [sedikit] versus irasional/tadisional [mayoritas]
- Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang terserak versus terkooptasi
- Kecenderungan **menguatnya serdadu/militer dalam politik**
- **Harapan**: perubahan demografi pemilih [bertambahnya pemilih generasi Z dan Alpha]

Kondisi internal Partai:

- Orientasi *office seeking* [*rent seeking* sangat kuat]
- Non-ideologis--politik kartel
- Non-oposisi
- Yang penting dapat suara/lolos *parliamentary threshold*

Pemilih pada Pemilu 2024

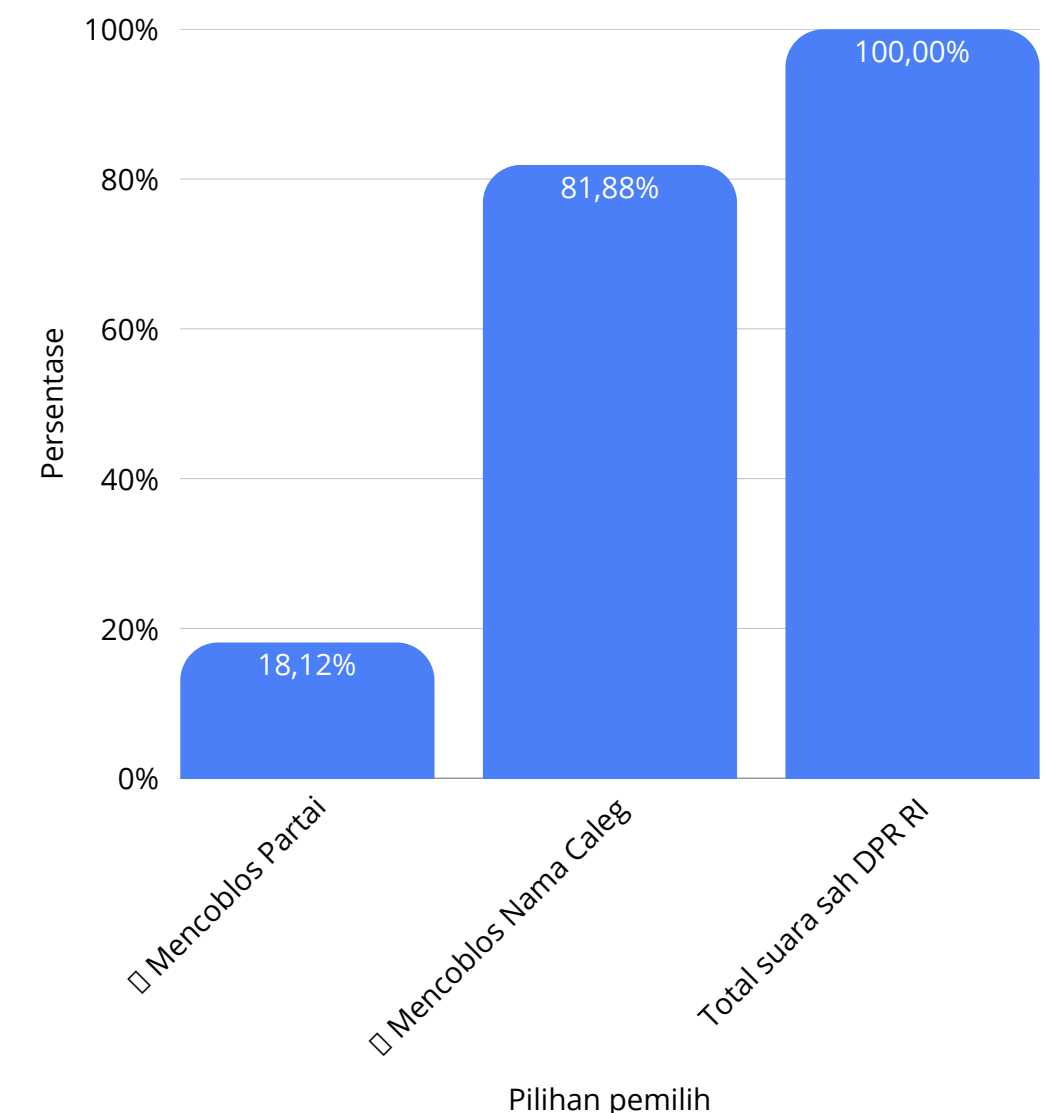
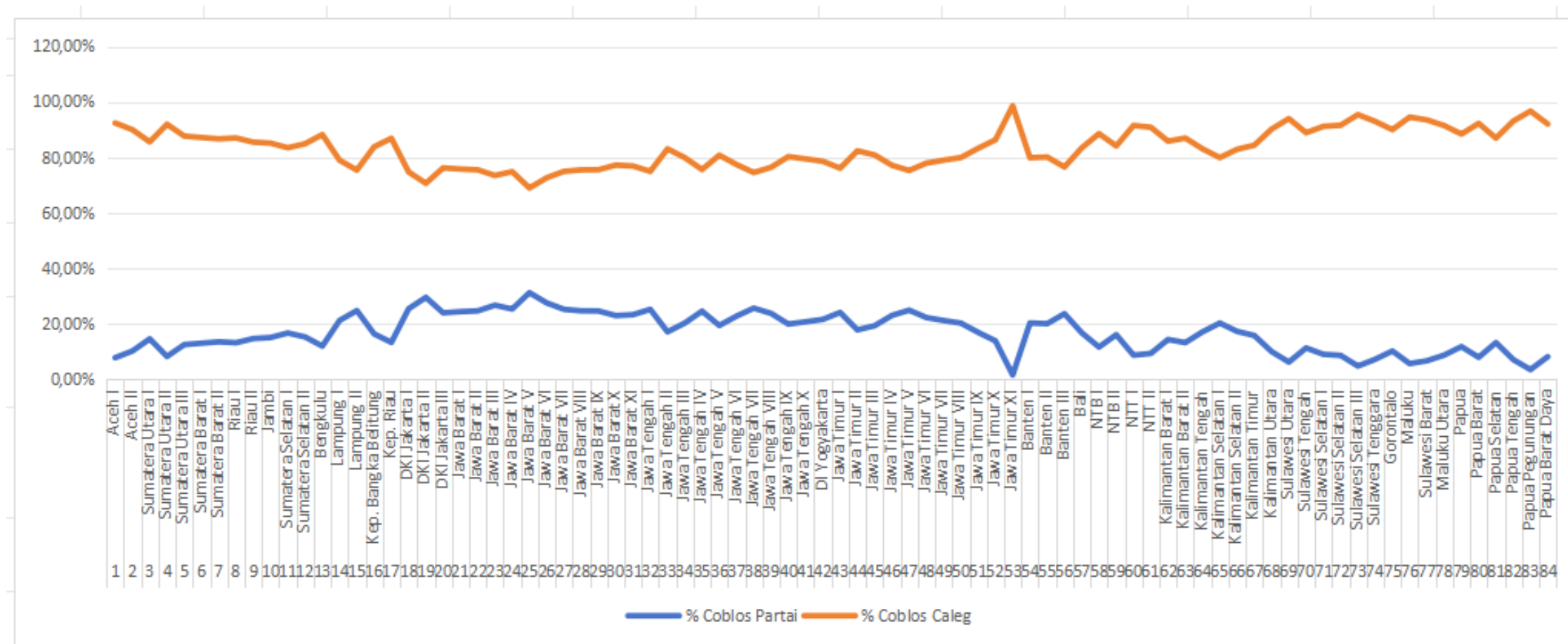
Paradoks pemilih dalam menentukan pilihan politiknya

Asumsi:

- Pemilih Indonesia terjebak pada kesulitan dalam menentukan pilihan politik sebagai dampak banyaknya calon anggota legislatif. Kesulitan pemilih dalam memberikan suara karena banyaknya surat suara yang mengakibatkan tingginya suara tidak sah (sumber survei LIPI tahun 2019);
- Dampak desain 5 jenis surat suara pada Pemilu 2024 menyebabkan terjadinya fenomena *split ticketing vote*, ada kecenderungan suara dibagi: Pilpres, DPR, dan DPRD
- Kecenderungan kecerdasan pemilih (*political efficacy*) semakin melemah dalam kontestasi politik di Indonesia.
- Pengaruh sistem pemilu proporsional terbuka (nasional--serentak) menjadi salah satu penyebabnya

Kenyataan:

Kecenderungan pemilih lebih besar memilih nama calon dibanding lambang partai



Data ini perlu diuji: apakah orientasi pemilih memang benar-benar cenderung ke caleg, ataukah ada faktor lain: misalnya kekerabatan, dinasti, politik transaksional, atau penyebab lain?

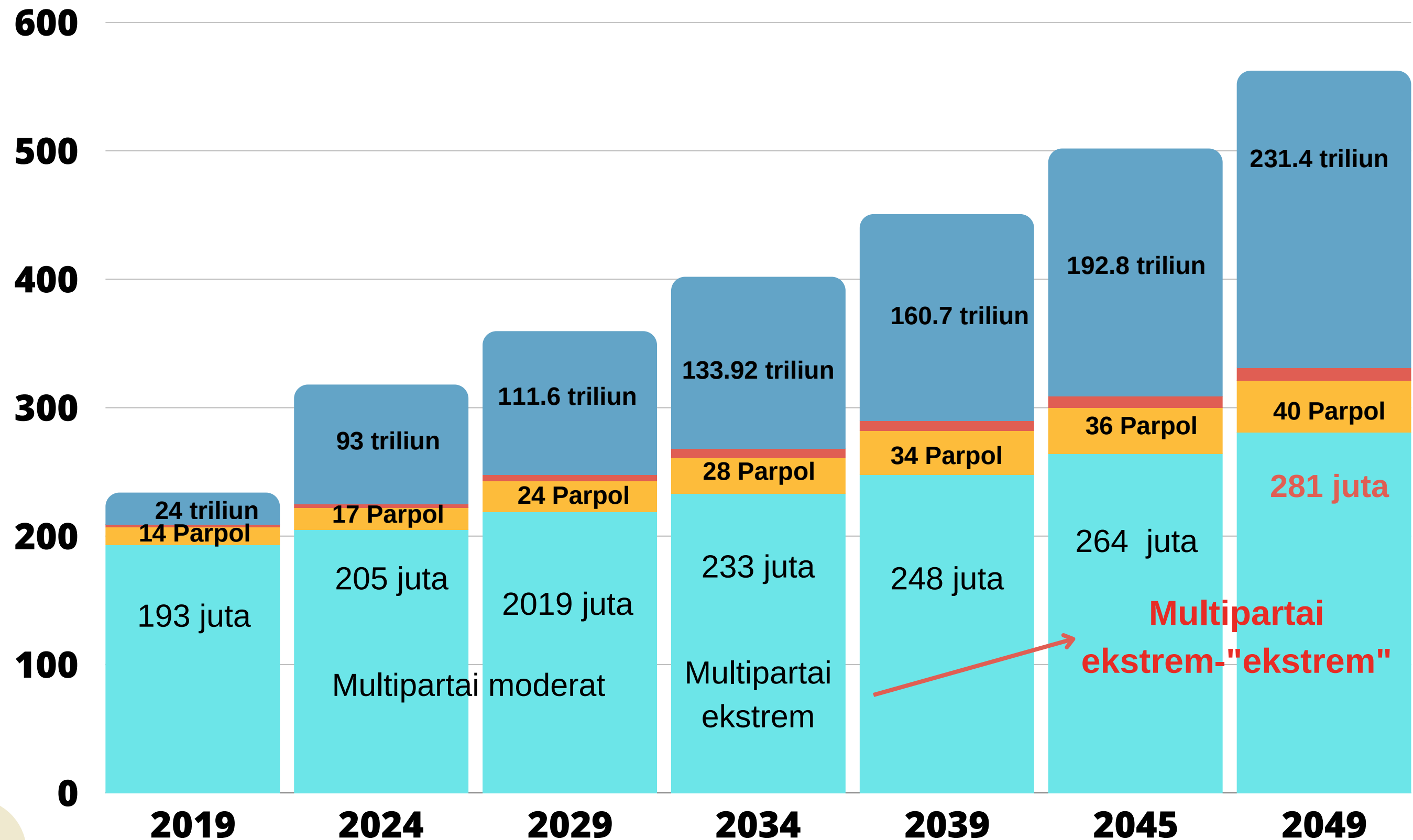
Pemilih pada Pemilu 2024

- Proyeksi berdasarkan asumsi rata-rata kenaikan jumlah pemilih di Indonesia per 5 tahun adalah 6,5%
- Perkembangan sistem kepartaian bergerak dari multipartai moderat menjadi **multipartai ekstrem** [penghitungan didasarkan pada skenario penambahan xn dan volatilitas pemilu 10-20% serta perpecahan elite politik)
- Kecenderungan perpecahan elite dan potensi pendirian parpol akibat dorongan faktor kepentingan
- **Sistem pemilu proporsional akan sangat rumit dan kompleks**

Indonesia 2045 berpotensi terjebak Multipartai Ekstrem

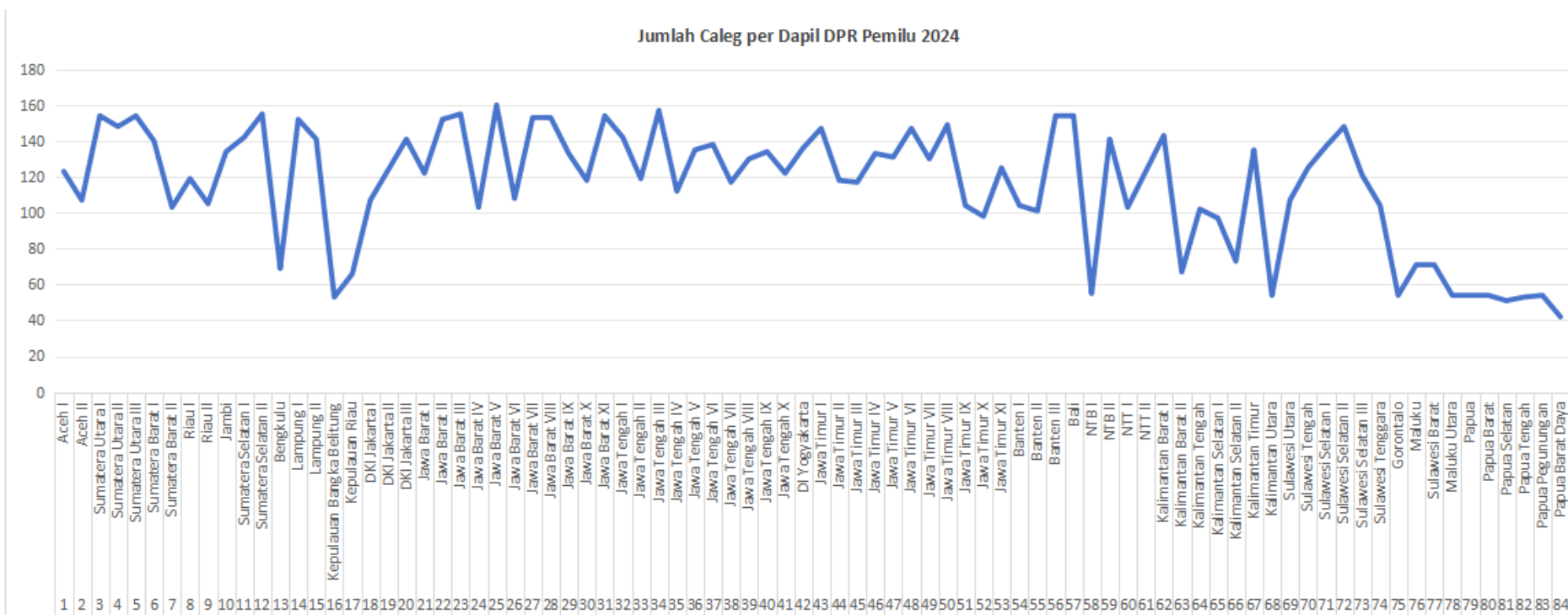
Proyeksi dan Skenario Jumlah Pemilih, Partai dan Capres 2029-2045

● **Pemilih (Juta)** ● **Partai** ● **Capres** ● **Anggaran**



Penyiapan Calon Legislatif dan Kepala Daerah

Calon Anggota Legislatif



- Partai terjebak pada penyiapan calon anggota legislatif antara 90-100 persen kuota kursi setiap daerah pemilihan;
- Perlu ada koreksi atau perubahan:** agar partai tidak menyiapkan calon sebanyak kuota kursi. Dilemanya, ada tuntutan agar bisa lolos *parliamentary threshold*. Dampaknya, pertimbangan *vote seeking* jauh lebih dominan dibandingkan dengan kualitas calon, sehingga partai akan mencalonkan sesuai dengan kuota kursi, padahal data pemilu dari satu pemilu ke pemilu berikutnya (Sejak Pemilu 2004-2024), perolehan kursi partai di setiap daerah pemilihan tidak 100 persen kuota kursi, tapi hanya berkisar antara 15-25 persen (1 hingga 2 kursi).
- Peningkatan persyaratan caleg (anggota DPR-RI), dengan mempertimbangkan mekanisme: (a) larangan lompat pagar, karena itu batasan sebagai kader partai bisa menjadi syarat, apakah 3 tahun atau 5 tahun, dan sudah mengikuti jenjang pengkaderan tertentu sesuai dengan AD/ART Partai; (b) kecakapan politik yang bisa diukur; (c) larangan berbisnis (menghindari konflik kepentingan) (d) UU perlu membuat syarat yang dapat diukur karena selama ini syaratnya terlalu abstrak.

Calon Kepala Daerah

Kesenjangan antara teori rekrutmen politik dengan praktek

Teori

- Teori Rush dan Althoff (terbuka/tertutup)
- Teori Pippa Norris (*supply dan demand*)
- Teori Lester G. Seligman (sertifikasi, seleksi, nominasi, pemilihan/*election*)

Praktik Politik

- Elektabilitas/popularitas (*office seeking*)
- Modalitas (*rent seeking*)
- Dinasti politik
- Sentralisasi ke DPP

Faktor penentu: Orientasi kemenangan jauh lebih dipertimbangkan daripada kapabilitas

- Kecenderungan umum (tidak semuanya), partai terjebak pada orientasi mencari kandidat yang potensial bisa menang, sehingga cenderung mengabaikan kapabilitas;
- Screening kapabilitas tidak menjadi alat ukur dalam proses penjaringan dan penyaringan calon;
- Perilaku pemilih yang “transaksional”, menyebabkan tidak ada jaminan calon-calon yang dianggap memiliki kapabilitas untuk terpilih

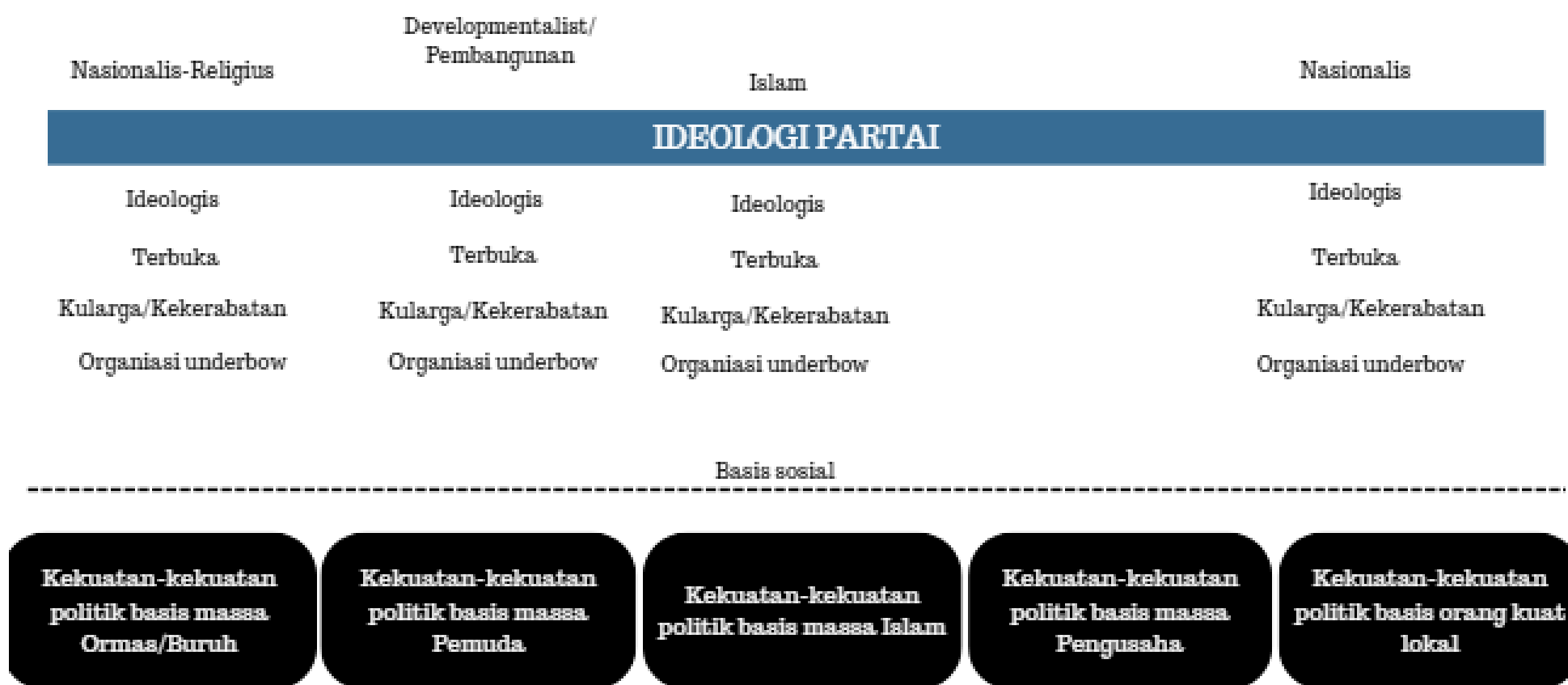
Alternatif:

- Mendorong pencalonan kader terbaik sebagai pilihan utama partai dengan mencegah masuknya calon dari eksternal (luar)
- Persyaratan sebagai kader partai menjadi bagian penting dalam UU Pilkada sehingga ada keterhubungan antara proses kaderisasi dengan rekrutmen politik
- Membatasi ruang politik mantan militer, agar tidak secara otomatis bisa mencalonkan, tetapi ada jeda waktu antara 3-5 tahun.
- Larangan berbisnis untuk menghindari konflik kepentingan

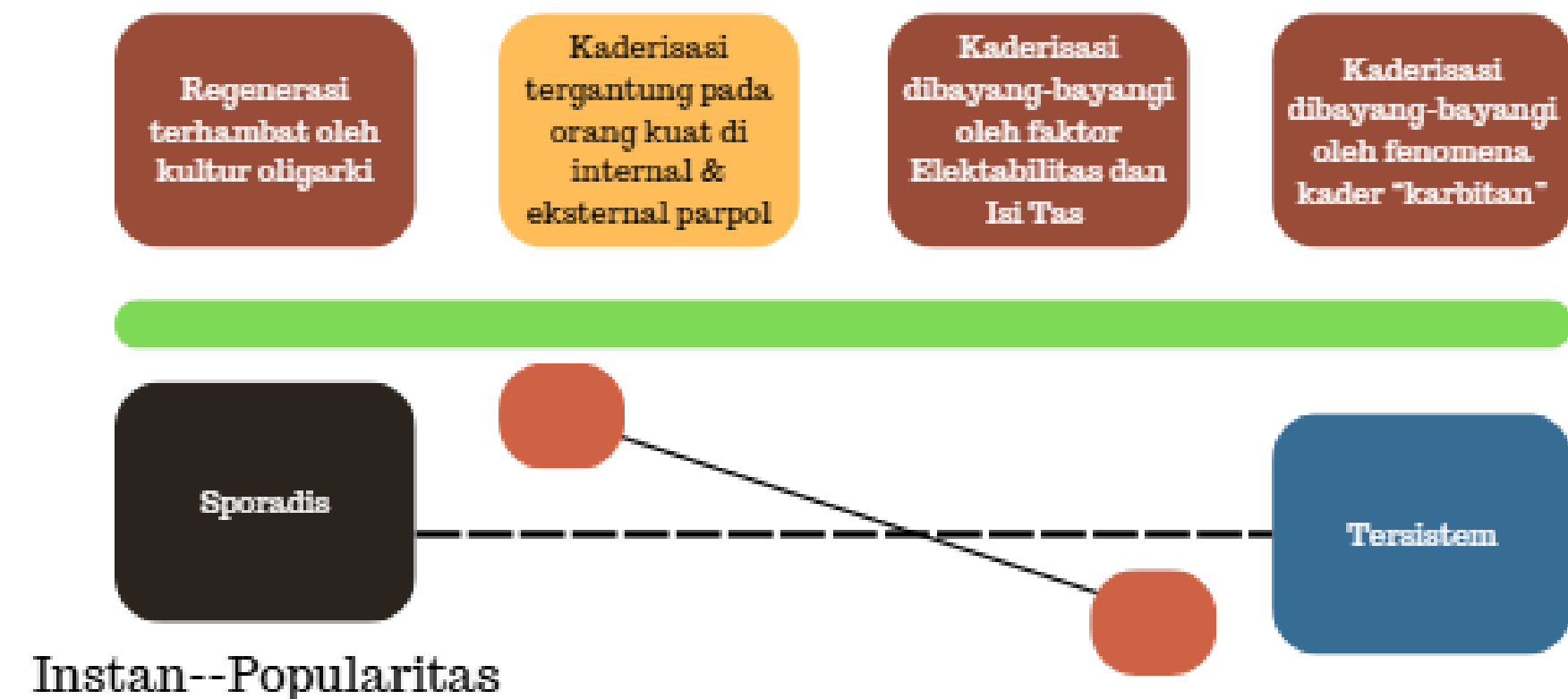
Kaderisasi dan Penyiapan Rekrutmen Politik

- Perkembangan partai politik di Indonesia menghadapi kondisi: persofinifikasi & dinasti politik, serta tantangan regenerasi politik.
- Implikasinya:** kaderisasi berjalan (dilakukan), namun tidak menyiapkan calon-calon kepemimpinan politik. Ini sebagai dampak dari menguatnya *catch all party* dan partai kartel pasca reformasi.

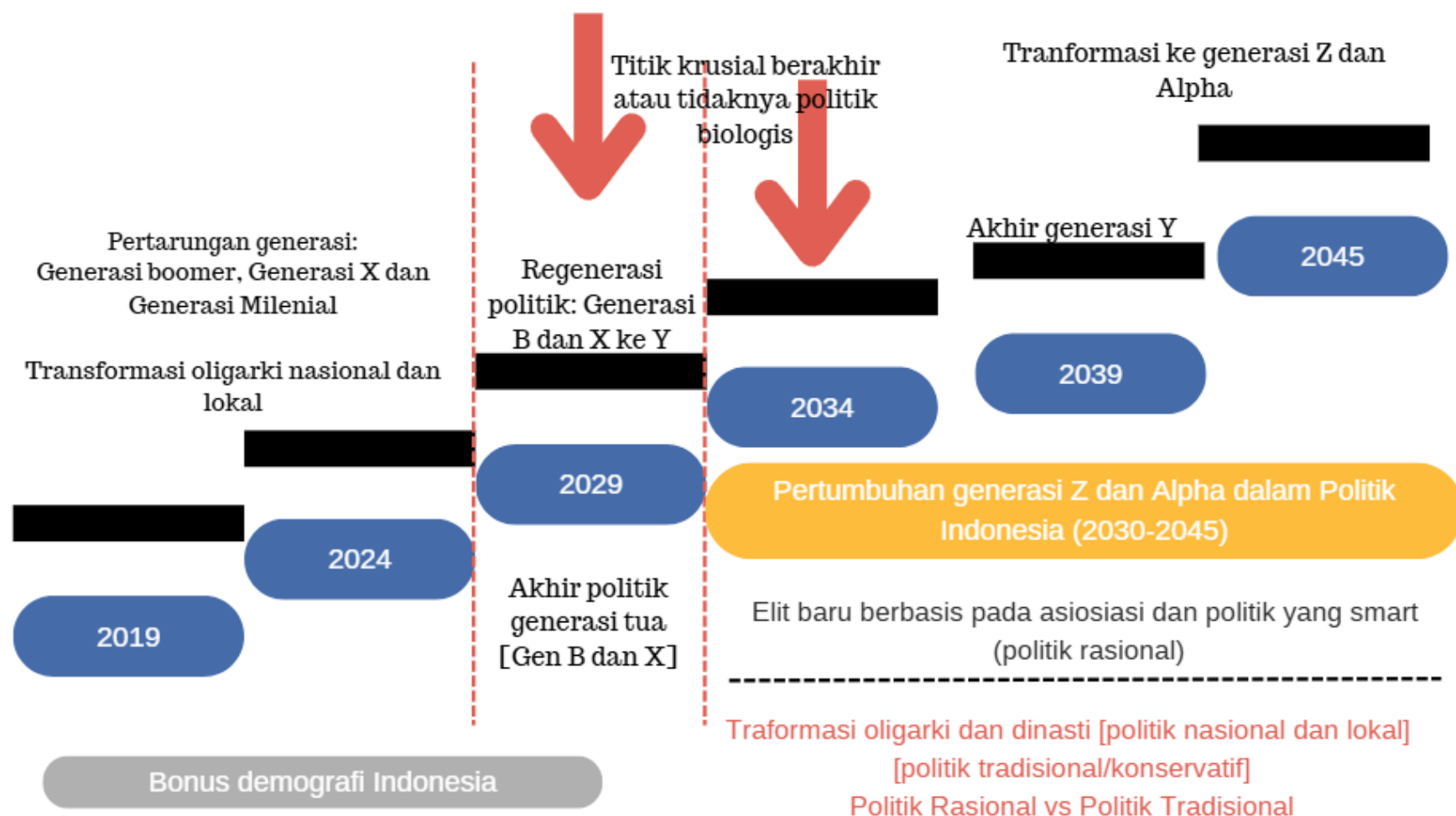
POLA KADERISASI BEBERAPA PARTAI POLITIK



TANTANGAN KADERISASI PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA



Problem *Regenerasi Politik & Political Efficacy*



Perubahan Perspektif Politik Indonesia [Reformasi Jilid 2]

Regenerasi dan Tranformasi Generasi Politik: Skenario Linier

INDONESIA											
Umur	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
(I)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
0-4	22 075,0	22 065,0	22 053,3	22 041,1	22 026,1	22 011,7	21 997,4	21 984,1	21 972,9	21 964,7	21 959,7
5-9	22 027,5	22 042,2	22 051,4	22 055,0	22 053,5	22 047,3	22 038,0	22 027,0	22 014,2	22 000,8	21 968,9
10-14	21 991,1	21 991,9	21 992,7	21 993,5	21 993,5	21 993,5	22 014,2	22 029,2	22 038,6	22 042,6	22 041,3
15-19	21 817,0	21 760,3	21 727,6	21 719,1	21 735,0	21 774,9	21 823,0	21 863,8	21 897,8	21 925,1	21 946,0
20-24	21 671,7	21 668,6	21 670,5	21 673,8	21 662,5	21 644,3	21 588,7	21 556,8	21 549,0	21 565,2	21 605,0
25-29	21 691,3	21 664,2	21 612,4	21 554,4	21 514,1	21 464,9	21 462,5	21 465,1	21 469,1	21 458,5	21 441,0
30-34	21 529,3	21 533,7	21 542,4	21 544,3	21 523,4	21 497,2	21 471,1	21 420,6	21 363,7	21 324,4	21 276,3
35-39	21 328,1	21 325,1	21 324,9	21 323,3	21 330,0	21 339,7	21 345,0	21 354,5	21 357,3	21 337,4	21 312,2
40-44	21 073,2	21 091,8	21 111,7	21 123,0	21 126,8	21 127,8	21 126,0	21 127,0	21 126,6	21 134,2	21 144,9
45-49	20 606,4	20 658,1	20 703,6	20 749,0	20 787,6	20 816,1	20 836,4	20 857,7	20 870,5	20 875,7	20 878,1
50-54	19 888,0	19 998,8	20 073,8	20 125,9	20 171,1	20 223,8	20 276,9	20 323,9	20 370,7	20 410,7	20 440,8
55-59	18 258,8	18 485,4	18 711,7	18 932,2	19 126,3	19 280,3	19 390,6	19 466,2	19 519,5	19 566,1	19 619,9
60-64	16 297,7	16 537,4	16 752,9	16 947,9	17 139,6	17 338,7	17 558,4	17 777,6	17 990,8	18 178,5	18 327,7
65-69	13 307,3	13 668,9	14 020,5	14 355,9	14 667,1	14 935,6	15 159,6	15 361,7	15 545,3	15 726,0	15 913,5
70-74	9 839,5	10 159,5	10 484,1	10 805,3	11 122,4	11 445,4	11 761,9	12 069,4	12 362,4	12 634,1	12 869,3
75+	1 095,0	1 146,3	1 197,4	1 249,2	1 301,2	1 354,3	1 407,6	1 460,8	1 513,8	1 566,8	1 620,4
Total	304 211,9	306 019,3	307 752,9	309 411,9	310 996,2	312 505,6	313 940,7	315 302,5	316 592,2	317 811,3	318 960,0

Sumber: SUPAS Badan Pusat Statistik, Kementerian Bappenas, dan UNFPA, 2018.

Generasi Z dan Alpha--
kemungkinan akan terlibat
politik pada 2038
dan akan dominan pada Politik
Indonesia 2040-an

**Titik krusial
regenerasi politik,
terjadi pada
2035-2039**

**Transisi generasi
baru; atau generasi
dinasti**

- Kondisi di atas niscaya membutuhkan peta jalan regenerasi politik. Masalahnya, apa basisnya? Apakah *political efficacy*, ataukah masih dihantui oleh pola dan kecenderungan transformasi oligarki dan dinasti politik
- Partai politik menurut hemat saya belum memikirkan hal ini, bahkan dalam dokumen perencanaan untuk penguatan demokrasi di Indonesia hingga 2045, upaya penyiapan regenasi politik sepertinya tidak dipersiapkan secara matang. Pertanyaan besarnya bagaimana politik generasi Z dan Alpha yang cenderung a-ideologis, dan tidak terfragmentasi politik ideologi aliran akan bekerja membangun Indonesia ke depan?

Problem *Political Efficacy* Pemilih Indonesia

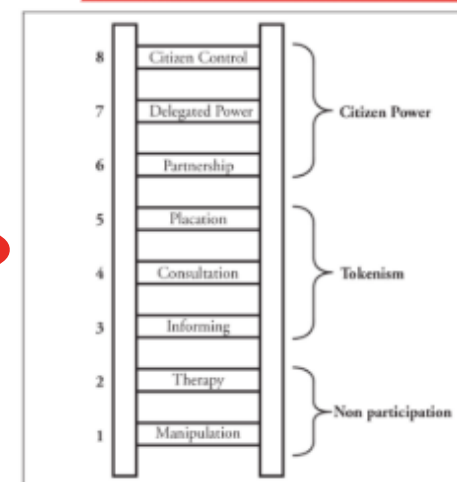
- Campbell dkk. (1954) mengenai proses pengambilan keputusan pemilih, dalam masyarakat demokratis;
- (Pollock, 1983), penurunan efikasi politik dapat merugikan baik legitimasi maupun stabilitas fungsi demokratis;
- Dalam hal perilaku politik, penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara efikasi politik dan berbagai bentuk partisipasi politik, termasuk pemungutan suara (Karp & Banducci, 2008) serta segala bentuk partisipasi non-elektoral (Verba et al., 1995), termasuk partisipasi politik secara daring (Oser et al., 2022).
- Hubungan timbal balik antara efikasi politik dan partisipasi politik (Finkel, 1985);
- (Niemi et al., 1991), ukuran efikasi internal ini menilai apakah individu merasa berpengetahuan atau memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi dalam politik.
- **Problem kita:**
 - a. **Politik transaksional**---partisipasi yang dimobilisasi
 - b. **Kuatnya pemilih tradisional** dibandingkan rasional--partisipasi yang mudah ditipu
 - c. **Kuatnya pengaruh kekerabatan** & dinasti politik/orang kuat lokal
 - d. **Kuatnya populisme** dalam elektoral
 - e. **Manipulasi informasi** (hoaks dan sejenisnya)

Siapa yang melakukan?



Trasformasi Partisipasi dalam Politik Indonesia

- Partai politik memelihara problem political efficacy dalam partisipasi pemilih pada Pemilu
- Program partai dan ideologi partai tidak menjadi unsur utama untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen
- Partai sengaja menjadikan kondisi transaksi politik sebagai jalan pintas dalam mencari keuntungan elektoral

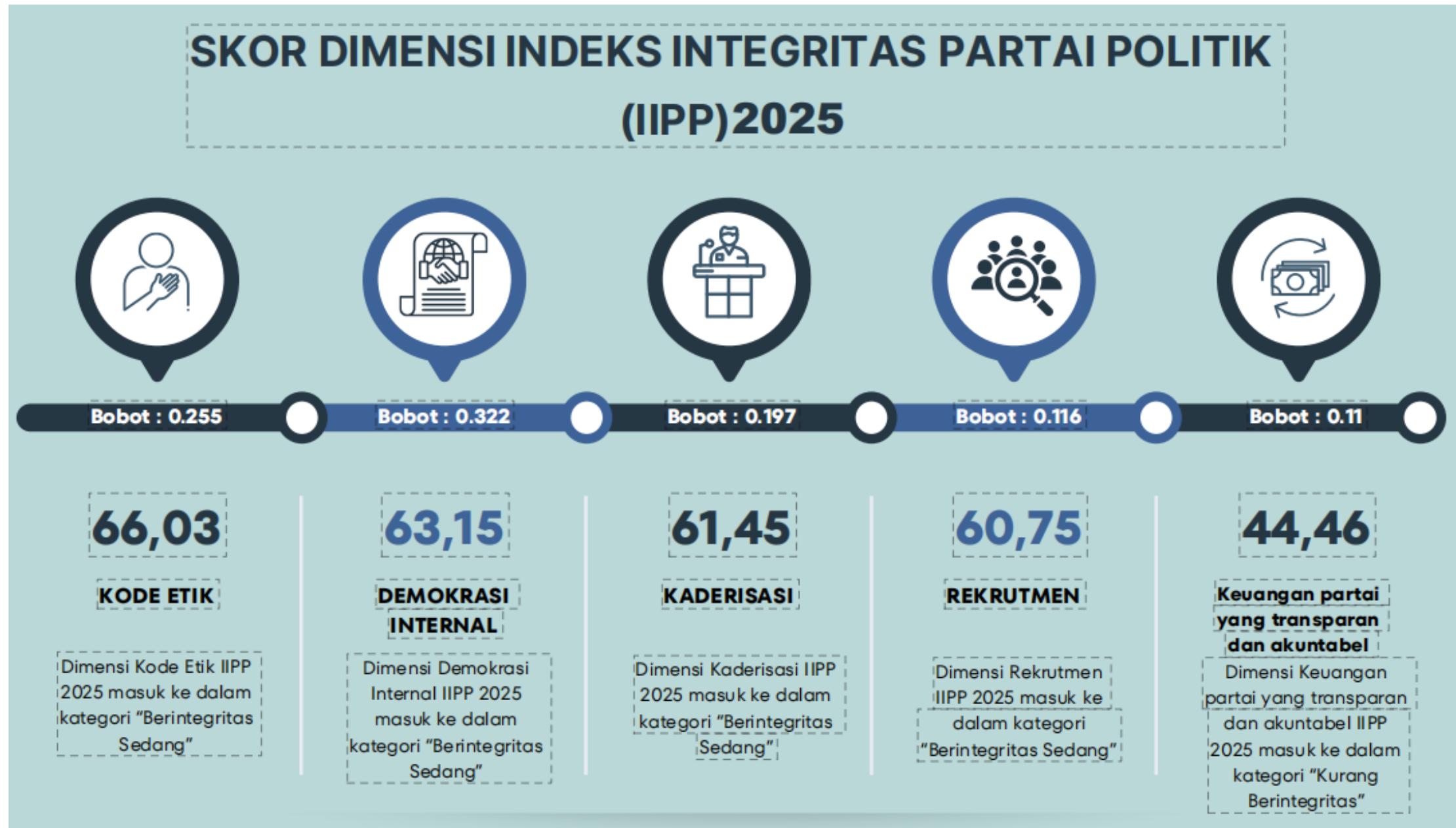


Arstein, 1969



- **Kecerdasan politik (Political Efficacy)**
- **Smart society (Masyarakat yang cerdas)**
- **Smart literacy (Literasi yang cerdas)**
- **Non-transactional politics**
- **Non-mobilisasi politik**

Gambaran Integritas Partai Politik



- Pengukuran IIPP 2025 yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemeko Polkam dan Bappenas, memberikan gambaran bahwa rekrutmen (politik) dan kaderisasi partai politik secara umum masih tergolong pada berintegritas sedang.
- Secara keseluruhan, perkembangan partai politik di lihat dari 5 dimensinya (Kode Etik, Demokrasi Internal, Kaderisasi, Rekrutmen, Keuangan Parpol yang Transparan dan Akutabel mendapat skor 61,22 (Berintegritas Sedang).

CATATAN PENUTUP: TANTANGAN KONSOLIDASI DEMOKRASI INDONESIA

I
D
E
A
L

Pemilu & partai, idealnya menjadi instrumen demokrasi sebagai sarana konsolidasi demokrasi--
[konsolidasi kedaulatan rakyat]

K
E
N
Y
A
T
A
N

Partai politik melalui pemilu di era reformasi mengantarkan kekuatan-kekuatan politik oligarkis dan orang-orang kuat di tingkat lokal

Ekosistem budaya politik dan masyarakat tidak berubah

Politik transaksional semakin merajalela dan **proses politik menjadi mahal**

Tantangan terbesar bercokolnya:

- Oligarki;
- Orang kuat lokal;
- Kecenderungan partai firma, partai kartel dan personalisasi parti;
- Civil society terkooptasi ;
- Maraknya KKN [berdalih political appointte];
- Biaya politik tinggi; dan
- Maraknya korupsi
- Populisme politik-elektoral

Tantangan ke depan adalah demokrmasi seperti apa yang akan kita praktikkan?